

***INDONESIAN INTERESTS IN COOPERATION WITH THE CZECH REPUBLIC
IN THE FIELD OF DEFENSE 2015-2018***

Oleh : Bayu Lesmana

Bayulesmana668@gmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Bibliography : 12 Journals, 21 Books, 4 Tabloid 34 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Indonesia is working to improve its country's defense strength. Indonesian defense equipment is currently is not in a optimal condition to support Indonesia's defense. In addition to striving to improve its defense systems, Indonesia also strives to increase the independence of its defense industry to creat an independent country and reduce dependency with other countries. The sources of this research were obtained through literature reviews, books, websites, and others. The source of analysis is qualitative methods. This study uses the level of analysis of the nation state, neorealism perspective that illustrates that every country does not have to pursue strength but also must work together and the theory of International Cooperation as an answer for countries of the world international. To increase its defense strength, Indonesia is conducting defense cooperation with other countries, one of the countries that is Indonesia's defense cooperation partner, is the Czech Republic. This aims of thesis is to explain the existence of this collaboration is expected to improve Indonesia's defense capabilities and create an independent defense industry.

Key Words: International Cooperation, Defense, Minimum Essential Force, Indonesian Defense Industry.

PENDAHULUAN

Hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan antarbangsa dalam segala bidang yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hubungan ini biasa disebut dengan hubungan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Meskipun negara negara telah memiliki kemerdekaan secara hukum, akan tetapi negara tidak bisa dipisahkan karena pada prinsipnya negara akan hidup secara berdampingan.¹

Pada abad-21 ini negara negara dihadapkan pada ancaman kemanan yang baru seperti kejahatan terorisme, kejahatan *cyber*, konflik etnis, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan adanya kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah yang ada di dunia internasional secara bersama.² Dalam dunia internasional, secara garis besar isu di dalam hubungan internasional dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu : yang pertama adalah *high politics issues*, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup negara (*state's survival*), dalam kategori ini terdapat isu politik, keamanan dan ekonomi. Dan yang kedua adalah *low politics issues*, dalam kategori ini terdapat isu-isu seperti: perdagangan obat-obatan terlarang, peredaran senjata gelap, penyelundupan manusia, pemanasan global, kejahatan terorganisir lintas-batas negara, dan lain-lain.

Setiap negara seperti halnya Indonesia, memiliki kepentingan serta

kebutuhan yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kekuarangan masing-masing. Hal inilah yang mendorong diperlukannya kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip dan asas saling menghormati dan saling menguntungkan, karena pada umumnya kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Mewujudkan perdamaian dan menciptakan kesejahteraan dunia. Melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.

Dalam melakukan kerjasama internasional, setiap negara yang mengadakan kerja sama dengan negara lain memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya.³ Sebagaimana penjelasan diatas, pada prinsipnya, setiap negara tidak dapat berdiri sendiri, mereka harus bekerja sama dengan negara lain. Kerjasama tersebut dilakukan dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan dengan tetap memegang prinsip kesetaraan, keadilan dan saling menguntungkan.

Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi kerjasama antar negara tersebut dapat didasarkan pada faktor perbedaan seperti perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan karena perbedaan ideologi, atau karena faktor persamaan seperti kesamaan sumber daya alam, kesamaan keadaan

¹ Jackson, Sorensen, *Pengantar ilmu hubungan internasional*. (Pustaka pelajar: yogyakarta, 2005), 59.

² Ishiyama Breuning, *Ilmu politik dalam paradigma abad ke-21*, (Kencana prenatal media group, 2013), 503.

³ Uraian materi KB modul 6, http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/27753/mod_resource/content/1/Uraian%20Materi%20KB%202%20Modul%206.pdf (diakses 16 Oktober 2018), 1-17.

wilayah, kondisi geografis, kesamaan ideologi atau agama yang dimiliki oleh negara negara yang menjalin kemitraan.⁴ Bahkan dalam perkembangannya, banyak kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan banyak negara. Bentuk kerjasama internasional tersebut dilakukan baik dalam kerangka kerjasama bilateral, regional ataupun multilateral/ internasional.

Kekuatan militer merupakan faktor penting dalam melihat kekuatan suatu negara. Pada dasarnya kekuatan militer digunakan untuk melindungi dan menjaga keamanan negara. Kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara akan menentukan kekuatan politik negara tersebut.⁵ Berakhirnya perang dingin bukan berarti menandakan isu tradisional menghilang, negara harus tetap membangun kekuatan militer untuk menjaga jika sewaktu waktu kedaulatannya terancam.

Dalam perjalanannya, Indonesia pernah membeli persenjataan militer dari produsen senjata terbesar dunia yaitu Amerika Serikat. Namun, setelah Amerika mengenakan sanksi embargo senjata terhadap Indonesia, Indonesia membuka lembaran baru kerja sama pertahanan dengan negara lain. Salah satu negara yang menjadi mitra strategis Indonesia dalam kerja sama dibidang pertahanan yaitu Republik Ceko. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya MoU (*Memorandum of Understanding*) di Jakarta pada tanggal 21 November 2006.

Faktor yang menjadi pendukung terciptanya kerjasama Indonesia dan Republik Ceko adalah sejarah panjang yang telah terjalin dengan Republik Ceko dimulai pada era presiden

Sukarno hingga saat ini. Pada era sukarno Indonesia menjalin persahabatan dengan negara Republik Ceko yang sebelumnya bernama Cekoslovakia. Pada masa pemerintahan Megawati Indonesia membeli alutsista dari negara Republik Ceko. Indonesia membeli 4 unit RM 70 GRAD yang digunakan untuk angkatan laut Indonesia. Pada masa pemerintahan SBY Indonesia juga membeli alutsista dari produsen Republik Ceko yaitu pembelian radar Eldis yang di gunakan untuk kebutuhan Indonesia dan berencana membeli peawat tempur L-159 untuk keperluan angkatan Udara Indonesia.

Republik Ceko dapat memenuhi kebutuhan Indonesia di bidang pertahanan. Selain harga yang relatif murah biaya perawatan alutsista tersebut juga tidak terlalu meberatkan anggaran pertahanan Indonesia. Selain harga yang murah, kebijakan ToT atau *Transfer of Technology* yang di berlakukan Indonesia dapat mendukung peningkatan pengetahuan teknologi serta dapat menciptakan kemandirian industri pertahanan di masa yang akan datang.

Republik Ceko memiliki kelebihan pada bidang Industri permesinan dan pertahanan. Hal ini dibuktikan banyaknya kendaraan tempur produsen asal Republik Ceko yang banyak di pakai oleh negara lain dan salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Ceko sepakat melakukan kerja sama bilateral untuk penguatan di sektor industri pertahanan. Kesepakatan itu diraih dalam pertemuan antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Martin Tlapa. Kedua negara memiliki potensi besar untuk menjalin kerja sama di sektor industri pertahanan, khususnya di bidang alat

⁴ *Ibid*, 1-17.

⁵ M Griffith, *International Relation Theories for the Twenty-First Centuries*, (New York: Routledge, 2007), 65.

utama sistem persenjataan (alutsista). Indonesia sendiri memiliki PT. Pindad yang telah berhasil mengekspor alutsista ke sejumlah negara.

MEF (*Minimum Essential Force*) merupakan kebutuhan Minimum Pokok atau yang biasa disebut sebagai MEF (*Minimum Essential Force*) adalah sebuah struktur kekuatan dari pertahanan suatu negara yang berada di level yang mencukupi untuk mencapai kepentingan nasional dan objek-objek dari pertahanan dan keamanan.⁶ Indonesia memandang Republik Ceko dapat memenuhi kebutuhan alutsista negara dengan cara melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi MEF (*Minimum Essential Force*) yang sedang diupayakan oleh Indonesia untuk melindungi kedaulatan serta memenuhi kepentingan nasionalnya.

MEF merupakan sebuah kebijakan dari Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk melakukan reformasi terhadap pertahanan nasional. Kebijakan ini dibentuk oleh SBY pada tahun 2009 melalui SDR (*Strategic Defense Review*), yaitu pembahasan strategi pertahanan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pertahanan nasional seperti alutsista, sumber daya prajurit, *training camp*, dll, yang diimplementasikan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010.⁷ MEF diimplementasikan untuk kebutuhan *defensive* saja dan tidak

⁶ Iis Gindarsah. *Politics, security and defence in Indonesia: Interactions and interdependencies*, (Australian National University, National Security College, 2013), 29.

⁷Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia No. 650)

digunakan untuk kebutuhan *offensive* seperti perlombaan senjata dan kapabilitas penyerangan pertama (*First Strike*).

Untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam mencapai MEF-nya, Indonesia melakukan kerjasama di bidang pertahanan dengan negara negara lain, salah satu mitra kerjasama Indonesia dalam bidang pertahanan adalah negara Republik Ceko. Indonesia sendiri memiliki motif kepentingan yang akan dicapai dengan bekerjasama dengan negara Republik Ceko. Disini peneliti akan mencoba untuk menguraikan serta menjelaskan apa saja kepentingan indonesia melakukan kerjasama dengan negara Republik Ceko serta menjelaskan apa saja yang telah terlaksana di dalam kerjasama pertahanan ini. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan satu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu, **“Apa Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Dengan Republik Ceko di Bidang Pertahanan Tahun 2015-2018”**.

PEMBAHASAN HUBUNGAN INDONESIA DAN REPUBLIK CEKO

Sejarah hubungan bilateral RI-Ceko dimulai pada saat pemerintah Cekoslovakia mendirikan Konsul Kehormatan di Batavia pada tahun 1924. Sedangkan Pemerintah Indonesia mendirikan “*Indonesian Information Service*” di jalan Slezska 12, Praha 2 pada tahun 1948. Pemerintah Cekoslovakia mengakui Indonesia sebagai suatu Negara berdaulat pada 2 Februari 1950, Cekoslovakia membuka Konsulat Jenderal di Jakarta secara resmi pada 7 Maret 1950 dan dinaikkan statusnya menjadi Kedutaan Besar pada

tahun 1957.⁸ Pada tahun 1961 di masa kepemimpinan presiden pertama Republik Indonesia, presiden Soekarno. Di bawah kepemimpinan presiden Soekarno kedua negara membentuk perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia (Cekoslovakia masih dibawah pengaruh faham komunis).

Setelah peristiwa revolusi beludru atau revolusi penghapusan pengaruh komunis terhadap negara Cekoslovakia, berdasarkan kesepakatan bersama negara Republik Sosialis Cekoslovakia resmi berpisah menjadi dua negara yaitu negara Republik Ceko dan negara Slovakia. Kedua negara resmi berpisah pada tahun 1992 dan berdiri sendiri. Pada 31 Desember 1992, RI memberikan pengakuan kepada Republik Ceko yang berpisah secara damai dari Slovakia. Hubungan diplomatik RI-Ceko dibuka pada 1 Januari 1993. Hubungan politik antara Indonesia dan Ceko berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sistem politik di Ceko yang terbuka dan kebijakan Indonesia yang lebih memperhatikan negara-negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur.

Kedua negara memiliki potensi yang besar untuk membina hubungan yang lebih erat. Ceko memandang RI letaknya sangat strategis dengan jumlah penduduk yang besar, memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya serta Asia Pasifik pada umumnya. Di samping itu, Ceko melihat Indonesia berperan aktif dalam kerjasama regional seperti ASEAN, APEC dan ASEM. Sedangkan menurut pandangan RI, Ceko

memainkan peran cukup penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa Tengah.

Hubungan bilateral kedua negara tercermin dengan adanya saling kunjung antara kepala negara/pemerintahan kedua negara. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Ceko pada 17-19 Juni 2002. Dan pada kesempatan itu, mendapatkan penjelasan mengenai industri militer/pertahanan Ceko. Sebelumnya, pada Oktober 1994 PM Vaclav Klaus telah lebih dahulu mengunjungi Indonesia. Peningkatan hubungan politis juga dilakukan kedua pihak dengan saling tukar kunjungan antara pejabat tinggi.

Saling dukung dalam keanggotaan organisasi internasional juga dilakukan antar kedua negara. Sejauh ini saling dukung antara Indonesia-Ceko banyak dilakukan secara resiprokal pada beberapa organisasi internasional seperti pada ITU Council untuk periode 2010-2014, Intergovernmental Committee of Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage / ICH UNESCO dan International Law Commission (ILC) periode 2012-2016.

Faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam membina hubungan dengan Ceko adalah semakin besarnya perhatian dan pembelaan terhadap demokrasi dan HAM sejak runtuhnya rezim komunis pada tahun 1989, baik di kalangan pemerintah, parlemen, media massa maupun masyarakat luas yang ditandai dengan menjamurnya LSM. Pemerintah Ceko secara umum menyambut baik dan mendukung proses demokratisasi di Indonesia dan mengharapkan konflik-konflik yang terjadi diselesaikan secara damai tanpa melanggar HAM. Ceko secara resmi mendukung integrasi dan

⁸ Sejarah Hubungan Republik Indonesia dan Republik Ceko, <https://www.kemlu.go.id/prague/lc/Pages/Ceko.aspx> (diakses 16 maret 2019)

keutuhan NKRI, menentang setiap upaya separatisme di Indonesia dan mendukung upaya-upaya Indonesia mengembangkan demokrasi, penanganan HAM serta penanggulangan terorisme.

Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Ceko, kedua negara melakukan pertemuan konsultasi dari waktu ke waktu untuk mendiskusikan perkembangan bilateral kedua negara dan isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara.⁹ Secara ringkas disampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-Ceko berjalan dengan baik dan seiring perkembangan jaman, maka hubungan bilateral tersebut harus semakin ditingkatkan dan dieratkan. Untuk mencapai kepentingan bersama dan mempererat persahabatan kedua negara yang telah dibangun dari sejak awal berdirinya kedua negara.

Pembentukan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Republik Ceko

Pada tanggal 21 November 2006 Indonesia dan Republik Ceko menandatangani Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities In The Field Of Defence*). Selanjutnya di proses dalam sidang paripurna DPR RI menjadi Peraturan Presiden no 8 tahun 2013 tentang

⁹ Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia Dan Republik Ceko, <http://www.indonesia.cz/indonesia-czech-republic-bilateral-relations/> (diakses 16maret 2019).

Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities In The Field Of Defence*). Dengan disetujuinya perjanjian ini maka dimungkinkan untuk melakukan pengadaan alutsista serta kerjasama pertahanan lainnya sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani bersama untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Ceko berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin sejak lama. Untuk meningkatkan hubungan bilateral tersebut maka Indonesia dan Republik Ceko sepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama di bidang pertahanan. Dengan adanya kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Ceko merupakan salah satu langkah positif untuk mempererat hubungan kedua negara.

Pembentukan Komite Bersama

Sesuai dengan Undang Undang, perlunya menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Defence cooperation Agreement* (DCA). Sebagai aspek legal dalam melaksanakan kerjasama pertahanan.¹⁰ MoU/DCA pada umumnya mencakup kerjasama dalam bidang intelijen, pendidikan dan pelatihan, operasi, logistik litbang, industri pertahanan dan pertukaran tenaga ahli. Untuk mengimplementasikan MoU/DCA ini maka dibentuk *Joint Committee* atau

¹⁰ Parulian Simamora, *Pluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan edisi pertama*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2013), 54.

Joint Working group yang akan melaksanakan pertemuan satu tahun sekali atau dua tahun sekali secara bergantian dan tergantung dari intensitas kegiatan yang dilaksanakan.

Indonesia dan Republik Ceko sepakat untuk membentuk komite bersama untuk mencapai tujuan perjanjian secara efektif, hal ini terdapat di pasal 5 dalam MoU antara Indonesia dan Republik Ceko. Komite bersama ini dibentuk dari wakil masing masing negara dengan jumlah yang sama antara kedua negara. Komite bersama dapat termasuk para ahli dalam jumlah terbatas dari kementerian atau departemen pertahanan. Pertemuan komite bersama antara Indonesia dan Republik Ceko dilakukan setahun sekali dan pertemuan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak.

KEKUATAN ALUTSISTA MILITER INDONESIA DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA

Kondisi Sistem Pertahanan Indonesia

Bila dilihat dari kondisi saat ini, TNI-AU menjadi matra pertahanan yang mengalami dampak paling signifikan dari perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi persenjataan. Hal ini terkait dengan mulai diterapkannya berbagai teknologi canggih seperti kemampuan *stealth* serta penggunaan UAV oleh angkatan bersenjata negara lain yang dapat dengan mudah masuk dan melanggar kedaulatan wilayah Indonesia.

TNI-AU saat ini mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan dan kemampuan radar maupun pesawat tempur sebagai kekuatan utama upaya mengatasi ancaman-ancaman tersebut. TNI AU hanya bertumpu kepada pesawat tempur F-16 A/B yang didatangkan dari AS pada periode tahun 1990-an, yang baru dapat kembali

sepenuhnya beroperasi pada tahun 2006 setelah AS mencabut embargo persenjataan terhadap Indonesia. Meskipun saat ini TNI telah mendatangkan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, secara kuantitas kemampuan persenjataan yang dimiliki belum mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia.¹¹

TNI-AL mengalami hal yang serupa. Saat ini TNI-AL tidak memiliki cukup armada untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia. Alutsista TNI-AL masih menggunakan kapal-kapal perang produksi lama bekas Jerman Timur dan Belanda. Bahkan untuk negara maritim seperti Indonesia, TNI-AL hanya memiliki lima unit kapal selam yang tentu saja belum memadai untuk membentengi wilayah laut Indonesia.

Kondisi ini jelas membuat wilayah laut Indonesia sangat rentan akan penyusup baik yang bermotif ekonomi seperti pencurian ikan dan perompakan maupun yang terkait dengan misi intelejen asing. Angkatan laut negara-negara tetangga maupun negara lain telah memiliki alutsista yang memadai untuk mempertahankan wilayah lautan mereka. Saat ini tren yang muncul adalah perlombaan negara-negara untuk membangun angkatan laut dengan kategori *blue waters navy*.¹²

Kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI-AD saat ini pada umumnya merupakan pengadaan lama yang dibuat antara tahun 1940 hingga 1986. Sebagian besar alutsista ini suku cadangnya tidak tersedia, bahkan pabrik yang membuatnya sudah tidak memproduksi lagi.¹³ Meskipun

¹¹ *Ibid*, 204.

¹² *Ibid*, 204.

¹³ Subekti, Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok

kemudian TNI-AD berfokus pada kemampuan anggota atau sumber daya manusia, namun keberadaan alutsista yang memadai menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan perkembangan teknologi pertahanan dalam ranah global.

Bagi TNI-AD, kebutuhan mendesak itu meliputi kendaraan angkut personel baik kendaraan darat maupun pesawat serta artileri medan dan artileri pertahanan udara. Di samping itu, tuntutan akan modernisasi senjata perorangan juga menjadi fokus karena sebelum menggunakan senjata SS-1 buatan PT. Pindad sebagai standar, TNI-AD menggunakan senapan serbu M16 dengan teknologi yang digunakan pada era perang Vietnam. Untuk dukungan operasional, TNI-AD masih mengandalkan Tank Scorpion yang tergolong dalam kelas *Light Tank* (tank ringan), padahal TNI-AD sekarang memerlukan *Main Battle Tank* (MBT), dukungan dari helikopter serbu, serta pesawat *counterinsurgency*.

Kondisi ketiga matra TNI terkait dengan alutsista yang dimiliki dan dioperasikan saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan alutsista untuk menopang sistem pertahanan negara. Masalah ini sangat penting untuk diselesaikan mengingat pada era modern keberadaan alutsista menjadi salah satu prasyarat utama dalam pemenuhan kebutuhan sistem pertahanan negara.

Realitas yang diperlihatkan oleh alutsista milik TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan khususnya Angkatan Udara membuat sistem pertahanan Indonesia sangat mengkhawatirkan ditengah perkembangan teknologi persenjataan yang semakin hari semakin pesat. Bila

Minimum, *Yudhagama*, Vol.32, No. 1, 21 (2012).

hal ini tidak segera diperhatikan, maka sistem pertahanan Indonesia akan dengan mudah dilumpuhkan oleh pihak asing maupun ancaman dari dalam negeri yang ingin mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Pertahanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2015, adalah masa transisi pemerintahan dari Kabinet Indonesia Bersatu kepada Kabinet Kerja. Banyak kebijakan - kebijakan baru terkait dengan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/ Lembaga . Hal ini tentunya juga akan berdampak pada kinerja kementerian Pertahanan. Dalam merencanakan program kerja dan anggaran pada TA. 2015 diharapkan lebih cermat dan realistis dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Terkait hal tersebut maka diperlukan kebijakan pertahanan negara yang dirumuskan dari berbagai aspek baik strategi, legislasi, penganggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan negara. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi pembangunan pertahanan negara untuk tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".¹⁴

Kebijakan *Minimum Essential Force* (2010-2024)

Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang

¹⁴ Media informasi kementerian pertahanan , Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015 Volume 52 / No. 36 / Januari-Februari 2015.

pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara.

Kepentingan utama kebijakan penyalarsan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan.¹⁵ Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama.

Pemenuhan MEF Melalui Industri Pertahanan Dalam Negeri

Tahun 2010 telah dicanangkan sebagai tahun kebangkitan industri pertahanan dengan pertimbangan bahwa “tidak ada masa depan tanpa teknologi

/no future without technology”, seiring dengan itulah menjadikan satu nafas antara pembangunan dan keberlanjutannya/ *suustainable development* untuk menumbuh kembangkan sinergitas antara pembangunan ekonomi dan pertahanan.¹⁶ Kebijakan pemerintah mulai tahun 2010 adalah pertahanan mendukung ekonomi (*economy backed by defence*), diharapkan bahwa nanti terdapat ruang yang tersedia bagi teknologi untuk mengubah masa depan bangsa dan negara. Hal penting yang menjadi atensi untuk merealisasikan pemberdayaan industri dalam negeri yaitu: pertama, kerja sama lintas instansi, kedua, manajerial dari BUMNIS (Indhan); dan ketiga pemenuhan keseluruhan kemampuan anggaran dan kemampuan SDM; keempat sarana prasarana yang tersedia.

Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bidang pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan (Indhan). Kemandirian industri pertahanan sangat bergantung pada tiga pilar pelaku Iptek, yaitu perguruan tinggi dan lembaga Litbang, industri, dan *user* (TNI sebagai pengguna). Oleh sebab itu, pemerintah akan segera merumuskan kebijakan terpadu bidang Iptek dan Indhan yang diarahkan pada kebutuhan industri pertahanan.

Pemenuhan Alutsista melalui *Joint Production*

Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista adalah mengutamakan produk dalam negeri,

¹⁵ Kementerian Pertahanan, *Kebijakan Penyalarsan Minimum Esensial Force Komponen Utama: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.19 Tahun 2012*, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wpcontent/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>, (diakses 5 maret 2019).

¹⁶ Kementerian Pertahanan, *Kebijakan Penyalarsan Minimum Esensial Force Komponen Utama: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.19 Tahun 2012*, opcit hal 18.

apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka menggunakan produk luar negeri namun tetap melibatkan industri dalam negeri salah satunya melalui mekanisme *joint production*.¹⁷ Bila industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka pemenuhan Alutsista dari luar negeri diusahakan tetap memberikan kompensasi melalui mekanisme Imbal Dagang lainnya oleh industri nonpertahanan. Kebijakan membangun infrastruktur industri pertahanan yang merupakan bagian dari industri nasional, perlu membangkitkan industri unggulan berbasis teknologi strategis dengan bekerja sama dengan negara lain.

Pembinaan industri pertahanan diarahkan pada pencapaian kemampuan desain, produksi, pemasaran, layanan penjualan, pemeliharaan, dan dukungan logistik terpadu yang memenuhi standar nasional/internasional secara bertahap, berlanjut, dan konsisten sesuai bidang industrinya, melalui pengembangan iptek yang melibatkan akademis, lembaga litbang, dan industri serta kerja sama dengan pihak luar negeri dalam rangka transfer teknologi.¹⁸

KERJASAMA INDONESIA DAN REPUBLIK CEKO DI BIDANG PERTAHANAN

Pengadaan Alutsista Militer Indonesia

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Ceko khususnya di bidang pertahanan berlangsung sejak lama dan terjalin erat. Ceko ingin kerja sama tersebut terus ditingkatkan. Khusus terkait kerja sama di bidang industri pertahanan, Ceko tidak hanya siap untuk kerja sama transfer teknologi tetapi juga siap bekerjasama di bidang

riset atau penelitian dan pengembangan. Saat ini Indonesia tengah melakukan beberapa upaya untuk memodernisasi kekuatan pertahanan, salah satunya melalui peningkatan industri pertahanan dalam negeri serta mengembangkan kerjasama industri pertahanan dari luar negeri.

Upaya untuk memodernisasi Alutsista Indonesia dilakukan pada saat kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Modernisasi alutsista menjadi salah satu prioritas TNI sejak memasuki tahun anggaran 2010.¹⁹ Modernisasi alutsista bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kekuatan TNI di angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, kemandirian industri pertahanan serta meningkatkan profesionalisme TNI.

Pembelian RM 70 Vampire

Pada tanggal 10 Agustus 2016, Cekoslowakia Group yang merupakan perusahaan produsen pertahanan terbesar di Republik Ceko dan Slovakia mengumumkan bahwa mereka telah mengekspor dua baterai peluncur roket RM-70 Vampire ke Indonesia senilai lebih dari 4,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 537 miliar. Pengiriman ekspor itu mencakup delapan RM-70 Vampire multiple rocket launchers yang dipasang pada improved Tatra Defence model T815-7 8×8 armoured chassis, dua Pertahanan T815 Tatra 8×8 operator amunisi lapis baja, satu Tatra Pertahanan T815 AV-15 kendaraan recovery berat, dan satu fire control unit.²⁰

¹⁹ Puguh Santoso, "Strategi Modernisasi Alutsista Tni Dalam Mewujudkan Pertahanan Negara Yang Tangguh", *Jurnal Yudhagama*, (2012), 6.

²⁰ Cekoslowakia Group Kirim RM-70 Vampire ke Indonesia dengan Nilai Kontrak Rp 537 Miliar.

¹⁷ *Ibid*, 19.

¹⁸ *Ibid*, 21.

Indonesia membeli 36 unit RM-70 Vampir multiple rocket launchers dari Republik Ceko ini dalam rangka untuk pemenuhan kekuatan marinir, khususnya kemampuan arteleri medan dari laut ke darat. Pada realisasinya Indonesia hanya dapat mendatangkan 8 unit dari 36 unit yang dipesan, sedangkan sisanya akan diajukan pada anggaran selanjutnya hingga memenuhi kebutuhan alutsista bagi korps marinir. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan di tubuh marinir pasukan angkatan laut Indonesia. Serta modernisasi alutsista untuk menjaga keamanan wilayah laut Indonesia.

Pembelian Radar Vera-NG

Wilayah udara yang begitu luas di wilayah Indonesia membutuhkan radar sebagai alat mendeteksi atau sebagai mata dan telinga. Gunanya untuk mengetahui kehadiran pesawat tempur, rudal atau pesawat jenis siluman dan drone dari pihak luar. Untuk itu diperlukan sistem radar yang mampu mendeteksi dan dengan jangkauan ratusan kilometer. Dan dari kabar yang terbaru bahwa Kemenham telah sepakat membeli perangkat radar dari Republik Ceko, yaitu Radar Pasif Vera-NG. Radar Vera-NG adalah radar pasif yang bisa di bawa ke mana-mana di tempat pegunungan atau tempat yang tinggi dan proses pemasangannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama.

Indonesia telah mengakuisi sistem Vera-NG untuk memberi peringatan dini dan memperkuat pertahanan di sekitar pangkalan udara Ranai di laut Cina Selatan. Proses pemilihan ini mengikuti proses seleksi

<https://jakartagreater.com/cekoslowakia-group-kirim-rm-70-vampir-ke-indonesia-dengan-nilai-kontrak-rp-537-miliar/>
(diakses 29 maret 2019)

yang dilakukan di tahun 2017, dengan pemasangan dan verifikasi yang harus diselesaikan selama tahun 2018. Kebutuhan radar bagi TNI AU saat ini masih belum dapat terpenuhi. Saat ini hanya ada 20 radar TNI AU yang beroperasi. Memasuki MEF Renstra II setidaknya TNI AU perlu menambah 12 radar lagi untuk memantau dan menjaga keamanan wilayah udara Indonesia.²¹

Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia Melalui Pertukaran Teknologi dan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia

Pembangunan pertahanan negara yang berbasis kemampuan (*Capability Based Defence*) diarahkan untuk mencapai kemampuan dan daya tangkal yang maksimal, sekaligus untuk mewujudkan kemandirian pertahanan negara. Pemenuhan kebutuhan sarana pertahanan, khususnya alutsista TNI masih mengandalkan produk yang bersumber dari negara lain, hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain cukup tinggi. Kemandirian pertahanan negara dapat diwujudkan dengan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memberdayakan industri strategis pertahanan nasional. Selain untuk kepentingan pertahanan secara langsung, dapat juga diarahkan untuk memberi efek pertumbuhan ekonomi serta kemandirian dan daya saing bangsa.²²

²¹ Lindungi Wilayah Natuna, Indonesia Pilih Radar Pasif Vera-NG, Pengendus Pesawat Stealth
<https://www.indomiliter.com/lindungi-wilayah-natuna-indonesia-pilih-radar-pasif-vera-ng-pengendus-pesawat-stealth/comment-page-1/>
(diakses 29 maret 2019)

²² Parulian Simamora, *Pluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan edisi pertama*. Op Cit, 57.

Transfer Teknologi Steyr Pandur II 8x8

Panser Steyr Pandur II 8x8 merupakan alutsista buatan Czechoslovak Group (CSG) dimana teknologi panser 8x8 belum dimiliki oleh Indonesia. Ketergantungan terhadap negara luar dapat diselesaikan dengan pengembangan bersama dan juga alih teknologi. Untuk mencapai kemandirian industri pertahanan nasional, Indonesia menerapkan kebijakan ToT setiap pembelian alutsista dari negara luar. Hal ini diatur di dalam Undang Undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Pemerintah Indonesia mewajibkan untuk melakukan proses ToT dalam setiap pembelian alutsista dalam rangka mendukung kemandirian alutsista Indonesia.

Salah satu upaya untuk menuju kemandirian industri pertahanan adalah dengan cara alih teknologi/*Transfer of Technology* yang dilakukan oleh Indonesia dengan Republik Ceko. Produksi bersama Panser Steyr Pandur II 8x8 telah dilakukan oleh Indonesia dan Republik Ceko sejak tahun 2016. Panser Steyr Pandur II 8x8 adalah salah satu dari 3 produk CSG yang sudah dibeli oleh TNI dan proses pembeliannya disertai dengan kesepakatan alih teknologi antara kedua negara. Dalam proses realisasinya Indonesia dan Republik Ceko melakukan *Joint Production* dalam pengembangan Panser Steyr Pandur II 8x8.²³

²³ Pindad-CSG Kenalkan Pengembangan Steyr Pandur II <https://jakartagreater.com/pindad-csg-kenalkan-pengembangan-steyr-pandur-ii/> (diakses 27 Maret 2019).

Produksi Bersama Amunisi Kaliber Kecil

Produksi Indonesia terhadap amunisi kaliber kecil pada saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan amunisi kaliber kecil dalam negeri. Kebutuhan nasional amunisi kaliber kecil tiga kali lipat dari kemampuan produksi PT Pindad.²⁴ PT Pindad hanya dapat memproduksi 165 juta butir peluru, dari kebutuhan nasional sekitar 300 juta peluru pertahun. Kebutuhan peluru ini untuk memenuhi kebutuhan militer, polisi, bidang pertahanan lainnya serta untuk olahraga menembak.

Untuk memenuhi kebutuhan amunisi tersebut PT Pindad menggandeng *Czechoslovak Group* untuk meningkatkan produksi amunisi kaliber kecil dalam negeri. Selain melakukan kerjasama dengan Republik Ceko, Indonesia juga melakukan perluasan pabrik guna meningkatkan produksi amunisi kaliber kecil. PT Pindad menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 700 miliar dimana 400 milira digunakan untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin mesin produksinya. Target produksi yang ingin dicapai adalah 275 juta butir pertahun.

Kebutuhan akan amunisi sangat besar 275 juta butir yang di targetkan belum dapat memenuhi kebutuhan nasional Indonesia. Kebutuhan akan amunisi bisa mencapai 2-3 kali lipat dari produksi yang telah ada. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PT Pindad melakukan kerjasama berupa *joint production* dan *built over transfer* (BOT). Kerjasama ini diharapkan dapat mencapai target dari kebutuhan

²⁴ Abdi Purnomo, Pindad dalam Berita : Pindad Baru Mampu produksi 165 Juta Butir Peluru <https://www.pindad.com/pindad-baru-mampu-produksi-165-juta-butir-peluru> (diakses 27 maret 2019)

Indonesia akan amunisi kaliber kecil. Kerjasama yang dilakukan guna untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dan menciptakan kemandirian didalam industri pertahanan nasional.

Pelatihan dan Pendidikan Personel Marinir Angkatan Laut Indonesia

Pada tanggal 2 Mei 2016 lalu, tim yang dipimpin Letnan Kolonel Marinir Hendy, secara khusus mengikuti pelatihan selama dua minggu meliputi materi pengawakan maupun pemeliharaan Senjata Raket RM 70 Grad di negara Republik Ceko. Pelatihan ini untuk meningkatkan keahlian dalam mengawaki dan memelihara sistem senjata Raket RM 70 Grad. Selama ini, RM 70 Grad memang sangat identik dengan keberadaan Pasukan Pendarat Korps Marinir TNI AL sebagai bagian dari sistem senjata yang dimiliki oleh angkatan laut Indonesia. RM 70 Grad mampu menembakan semua jenis roket kaliber 122,4 mm dengan jangkauan 30 hingga 36 km. Raket-roket amunisi RM 70 dapat membawa berbagai jenis hulu ledak yang dapat menimbulkan efek fragmentasi dan efek kejut yang dahsyat.²⁵

Untuk meningkatkan keterampilan para teknisi dan pengawak RM 70 Grad, Korps Marinir mengirimkan tim khusus ke Republik Ceko, tempat RM 70 Grad dibangun dan dikembangkan. Dengan diadakannya pelatihan ini di harapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh tim yang berangkat ke negara Republik Ceko, dapat diberikan kepada para prajurit Korps Marinir lainnya sehingga tingkat kemampuan mereka

meningkat dan menjadi prajurit yang handal dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tugas masing masing prajurit.

Kesimpulan

Kerjasama indonesia dan republik ceko bertujuan untuk meningkatkan alutsista serta bertujuan untuk meningkatkan industri pertahanan indonesia. kerjasama yang dilakukan meliputi pembelian alutsista seperti pembelian 36 unit rm 70 vampire untuk memodrenisasi alutsista pada matra tni al serta pembelian radar vera ng untuk meningkatkan kemampuan radar pada matra angkatan udara. selain pembelian alutsista kerjasam ini juga meliputi bidang industri pertahanan seperti produksi bersama panser steyr pandur ii 8x8 antara indonesia dan republik ceko serta kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan produksi amunisi indonesia untuk mencukupi kebutuhan amunisi kaliber kecil indonesia. selain alutsista dan industri pertahanan peningkatan kemampuan personel juga termasuk dalam kerjasama ini yaitu peningkatan kemampuan prajurit dalam hal pengawakan rm 70 grad untuk meningkatkan kemampuan personel tni dan mewujudkan tni yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anwar, Syaiful. Peran diplomasi pertahanan dalam mengatasi tantangan di bidang pertahanan. *Jurnal Pertahanan, Volume 4, Nomor 2.* (2014).

Santoso Puguh, "Strategi Modernisasi Alutsista Tni Dalam Mewujudkan Pertahanan Negara Yang Tangguh", *Jurnal Yudhagama*, (2012).

²⁵ Marinir Berangkat ke Ceko, Pelajari RM 70 Grad<https://jakartagreater.com/marinir-berangkat-ke-ceko-pelajari-rm-70-grad/> (diakses 29 Maret 2019)

Subekti, Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok Minimum, *Yudhagama*, Vol.32, No. 1, 21 (2012).

Kementerian Pertahanan, *Kebijakan Penyelarasan Minimum Esensial Force Komponen Utama: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.19 Tahun 2012*. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wpcontent/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>, (diakses 5 maret 2019).

Buku

Jackson, Sorensen. *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Pustaka pelajar: yogyakarta, 2005.

Ishiyama, Breuning. *Ilmu politik dalam paradigma abad ke-21*. Kencana prenda media group, 2013.

Griffith, M.. *International Relation Theories for the Twenty-First Centuries*. New York: Routledge, 2007.

Gindarsah, Iis. *Politics, security and defence in Indonesia: Interactions and interdependencies*. Australian National University, National Security College, 2013.

Simamora Parulian, *Pluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan edisi pertama*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2013.

Majalah

Media informasi kementerian pertahanan , Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015 Volume 52 / No. 36 / Januari-Februari 2015.

Website

Cekoslowakia Group Kirim RM-70 Vampir ke Indonesia dengan Nilai Kontrak Rp 537 Miliar. <https://jakartagreater.com/cekoslowakia-group-kirim-rm-70-vampir-ke-indonesia-dengan-nilai-kontrak-rp-537-miliar/> (diakses 29 maret 2019).

Lindungi Wilayah Natuna, Indonesia Pilih Radar Pasif Vera-NG, Pengendus Pesawat Stealth <https://www.indomiliter.com/lindungi-wilayah-natuna-indonesia-pilih-radar-pasif-vera-ng-pengendus-pesawat-stealth/comment-page-1/> (diakses 29 maret 2019).

Marinir Berangkat ke Ceko, Pelajari RM 70 Grad <https://jakartagreater.com/marinir-berangkat-ke-ceko-pelajari-rm-70-grad/> (diakses 29 Maret 2019).

Pindad-CSG Kenalkan Pengembangan Steyr Pandur II <https://jakartagreater.com/pindad-csg-kenalkan-pengembangan-steyr-pandur-ii/> (diakses 27 Maret 2019).

Purnomo Abdi, Pindad dalam Berita : Pindad Baru Mampu produksi 165 Juta Butir Peluru <https://www.pindad.com/pindad-baru-mampu-produksi-165-juta-butir-peluru> (diakses 27 maret 2019).

Sejarah Hubungan Republik Indonesia dan Republik Ceko, <https://www.kemlu.go.id/prague/lc/Pages/Ceko.aspx> (6 maret 2019).

Sejarah hubungan bilateral Indonesia dengan Republik Ceko diakses

dari
<http://www.indonesia.cz/indonesia-czech-republic-bilateral-relations/> (diakses 16 oktober 2018).